

BAB II

KEBERPIHAKAN IRLANDIA TERHADAP KONFLIK ISRAEL – PALESTINA

Untuk mengetahui latar belakang keberpihakan pemerintah Irlandia dalam konflik Israel Palestina, perlu untuk mengetahui latar belakang sejarah terjadinya konflik yang terjadi selama kurang lebih 68 tahun ini dan perkembangannya terlebih dahulu. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai sikap keberpihakan Irlandia sebelum dan sesudah kemerdekaan Israel. Kemudian perlu dilihat juga kondisi politik internal Irlandia karena kondisi politik internal suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan negara tersebut dalam mengambil keputusan dalam berbagai isu politik atau konflik.

2.1 Latar Belakang Terjadinya Konflik Israel Palestina dan Perkembangannya

Konflik antara Arab Palestina dan Israel merupakan sebuah fenomena konflik yang telah terjadi dari masa lampau hingga sekarang, tepatnya pada akhir abad ke 19 sudah mulai terlihat dan masih belum menemukan titik terang hingga sekarang. Masih banyak orang awam yang menganggap konflik tersebut didasarkan oleh perbedaan agama atau disebabkan oleh agama. Meskipun kedua kelompok memiliki perbedaan agama (Palestina meliputi agama Islam, Kristen,

Druze; Israel meliputi Yahudi), Namun pada dasarnya perbedaan agama tersebut bukanlah faktor utama yang menyebabkan konflik tersebut.

Kemunculan konflik ini pada dasarnya disebabkan oleh klaim kedua kelompok atas suatu wilayah seluas 10.000 mil persegi, atau sebesar ukuran Maryland, Amerika Serikat. Wilayah ini berada di Timur Tengah yang bertepatan di antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Lokasi ini bersebelahan dengan negara Mesir, Suriah dan Jazirah Arab. Wilayah ini pertama kali diberi nama wilayah Kanaan (Kuncahyono, Jerusalem: kesucian, konflik, dan pengadilan akhir, 2008). Tempat ini juga merupakan salah satu wilayah yang sakral bagi ketiga agama monoteisme, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Sehingga wilayah ini direbutkan oleh kedua kelompok tersebut. Masing-masing kelompok juga memiliki argumen yang mendukung atas klaim tersebut, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi kedua kelompok untuk berdamai.

Pada zaman dahulu banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Palestina. Hingga pada tahun 135 SM tentara Romawi datang dan menguasai wilayah tersebut yang menyebabkan pengusiran warga Yahudi atau menjadikannya sebagai budak oleh tentara Romawi. Pemberian nama Palestina juga pertama kali di pakai pada masa pemerintahan kerajaan Romawi. Sebelum dikenal dengan nama Palestina, wilayah ini lebih dikenal dengan Kanaan. Kata *kanaan* sendiri berasal dari bahasa Phoenicia, yakni *kinahha* yang berarti bahan celup kuno berwarna merah marun yang pada waktu itu merupakan barang dagangan penting. Kemungkinan besar bahan celup itu dihasilkan di daerah tersebut. Oleh karena itu, suku yang paling dominan tinggal di daerah itu disebut

suku Kanaan. Dipercayai bahwa suku Kanaan adalah keturunan Ham, putra kedua Nabi Nuh. Sedangkan orang-orang Israel adalah keturunan Sam, putra tertua Nabi Nuh (Kuncahyono, Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir, 2008). Hal ini menguatkan bukti klaim Israel bahwa sejak zaman dahulu bangsa Yahudi telah tinggal di daerah Palestina.

Saat Arab menguasai Palestina pada abad ke 7, budaya arab dan agama Islam masuk dan memberikan pengaruh terhadap budaya kepercayaan di tengah masyarakat Palestina selain Kristen dan Yahudi. Pada masa ini, orang-orang Yahudi diperbolehkan untuk kembali ke Palestina. Kemudian kepemimpinan di wilayah ini terus berubah dari masa ke masa, dari kepemimpinan pasukan Crusader hingga ke pemerintahan Ottoman dan kemudian di pimpin Inggris sebelum akhirnya konflik Israel dan Palestina ini muncul (Israel-Palestina.info, 2008, diakses pada 05/03/2017).

Pada abad ke 19 muncul sebuah tren yang diawali di Eropa, yaitu semua masyarakat di dunia mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai sebuah negara dan muncul keinginan untuk mendapatkan hak nasional mereka sebagai sebuah negara (pengakuan terhadap dirinya dan kedaulatan). Kelompok Yahudi dan pribumi Palestina juga tidak ketinggalan dalam mengembangkan kesadaran nasional dan melakukan pergerakan untuk mendapatkan tujuan nasional mereka. Dikarenakan kelompok Yahudi tersebar di seluruh dunia (diaspora), pergerakan Yahudi atau yang lebih dikenal pergerakan Zionis harus mencari sebuah wilayah dimana orang-orang Yahudi dapat datang dan tinggal. Wilayah yang dipilih pada akhirnya adalah tanah Palestina. Akhirnya pada tahun 1882 pergerakan Zionis

dimulai, dengan gelombang awal Yahudi di Eropa yang bermigrasi ke Palestina (Beinin & Hajjar, 2014). Kemudian gerakan ini dilanjutkan oleh kelompok-kelompok Yahudi di wilayah lain.

Gerakan Zionis tersebut di ciptakan oleh Theodor Herzl, seorang Jurnalis asal Wina, Austria. Gerakan tercipta akibat banyaknya paham *anti-semitism* di Eropa pada saat itu. Akibat adanya paham ini, ia mengajak untuk adanya pembuatan atau restorasi negara Yahudi dalam bukunya yang berjudul *The Jewish State* (Rothman, 2015). *anti-semitism* adalah prasangka buruk atau kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Paham ini juga dipercayai dianut oleh Hitler dan merupakan salah satu penyebab terjadinya tragedi *Holocaust* (ushmm.org, 2017, diakses pada 08/03/2017).

Pada tahun 1897, diadakanlah kongres Zionis pertama di Basle, Swiss dan membentuk organisasi Zionis dunia (*World Zionist Organization*) dengan Hazl sebagai Presiden/ketuanya. Kongres ini bertujuan untuk merumuskan tujuan pergerakan dan strategi pencapaiannya. Semua delegasi yang berjumlah 197 orang setuju dengan program Basle, yaitu pergerakan Zionis akan menuntut pembuatan rumah/negara di Palestina (yang pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Ottoman) yang dilindungi oleh hukum. Hal ini memunculkan reaksi yang berbeda-beda diantara orang-orang Yahudi, ada yang mendukungnya dan ada juga yang menentangnya. Ahad Ha'am, salah satu tokoh Yahudi, memperingatkan orang-orang Yahudi Khususnya pergerakan Zionis dengan mengatakan “penyelamat Israel (orang Yahudi) itu adalah Nabi, bukanlah seorang Diplomat” (zionistarchive.org, 2002, diakses pada 08/03/2017).

Setelah Perang Dunia I, akibat kekalahan Ottoman, Palestina diambil alih oleh pemerintah Inggris tepatnya pada tahun 1917. Pada tahun yang sama, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour memberikan isyarat kepada seorang Zionis kaya dan berpengaruh yaitu Lord Rothschild, bahwa pemerintah Inggris mendukung terbentuknya sebuah *homeland* bagi Yahudi di Palestina. Dari sinilah kemudian persoalan bermula dan berlangsung hingga sekarang (Kuncahyono, Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir, 2008). Hal ini lah yang disebut-sebut selama ini sebagai deklarasi Balfour. Isi deklarasi tersebut yaitu sebagai berikut:

“His Majesty’s Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which Me prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.” (bbc.com, 2001, diakses pada 08/03/2017)

Pada tahun 1936 mulai adanya perselisihan antara kaum Yahudi dan Arab. Tepatnya pada tanggal 15 April tahun 1936, dua orang Yahudi dibunuh oleh bandit Arab di jalanan antara wilayah Turkam dan Nablus. Esok harinya, dua orang Arab terbunuh dekat perkampungan Yahudi yaitu Petah Tikvah. Kemudian dua hari setelahnya di Jaffa, puluhan Yahudi di serang di jalanan. Hal ini kemudian berlanjut menjadi ebuah kerusuhan, Polisi hingga harus mengeluarkan tembakan untuk membubarkan masa di Tel Aviv. Situasi menjadi mencekam dan belum pernah terjadi sebelumnya hal seperti itu. Agar hal ini tak terjadi, Komite Tinggi buatan inggris akhirnya mendengarkan permintaan orang-orang Arab, yaitu menghentikan imigrasi Yahudi ke Palestina, pelarangan penjualan lahan

terhadap Yahudi, dan pembentukan Pemerintahan yang representatif. (Townshed, 1989). Kemudian pada tahun 1939, kertas putih pemerintah Inggris membatasi migrasi kaum Yahudi ke Palestina hanya sepuluh ribu orang pertahun, kecuali pada saat darurat (bbc.com, 2017, diakses pada 14/04/2017).

Pada tahun 1940an terjadilah peristiwa Holocaust, yaitu pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi di Eropa yang dilakukan oleh pasukan Nazi Jerman. Hal ini menyebabkan migrasi besar-besaran terhadap kaum Yahudi Eropa ke tanah Palestina. Kemudian juga pada tahun 1940an ini, kelompok bersenjata Yahudi di Palestina melawan pemerintah Inggris di Palestina dengan tujuan agar mendapatkan kemerdekaan dalam membentuk negara Yahudi, yang kita sebut sekarang sebagai Israel.

Pada tahun 1946 terjadi pengeboman hotel king david di Yerusalem yang merupakan tempat tinggal bagi orang-orang Inggris, tentara dan komandan polisi di Palestina yang dilakukan oleh kelompok Irgun, yaitu organisasi Zionis. 91 orang terbunuh diantaranya, 28 orang Inggris, 41 orang Arab, 17 orang Yahudi dan 5 dari negara lain (Aljazeera.com, 2009, diakses pada 14/04/17). Kemudian pada tahun 1947, Majelis Umum PBB mengesahkan partisi mandat Inggris terhadap Palestina yaitu wilayah Palestina dipisahkan menjadi dua negara yang berbeda, satu untuk Yahudi dan yang satu lagi untuk Arab (Katirai, 2001). Hal ini diterima oleh pemimpin Yahudi, namun ditolak oleh pemimpin Arab.

Tanggal 9 dan 11 April 1948 terjadi peristiwa pembunuhan massal Deir Yasin. Antara 100 dan 254 penduduk Palestina, yang sebagian besar wanita, anak-

anak dan orang tua dibunuh saat dan setelah penyerangan terhadap perkampungan Deir Yasin dekat Yerusalem oleh kelompok Irgun (Aljazeera.com, 2009, diakses pada 14/04/17). Kemudian pada 15 Mei 1948 dideklarasikan berdirinya negara Yahudi atau Israel yang merdeka. Inggris pun akhirnya meninggalkan tanah Palestina, dan sekaligus memulai terjadinya Perang Arab-Israel.

Tidak lama setelah Israel menyatakan kemerdekaannya, lima negara Arab yaitu Mesir, Transjordan (Yordania), Irak, Suriah, dan Lebanon menyerang Israel. Hal ini terjadi karena negara-negara Arab tidak setuju akan kemerdekaan Israel dan menolak keberadaannya. Konflik ini disebut juga sebagai konflik Arab-Israel yang pertama. Negara-negara koalisi Arab ini berhasil mengambil alih wilayah bagian Selatan dan Timur Palestina (britannica.com, 2017, diakses pada 18/07/2017). Mereka hanya mengambil alih wilayah Arab dan menyerang pasukan Israel serta beberapa pemukiman Yahudi. Sekitar 750.000 warga Palestina diusir secara paksa oleh Israel dari total 1.200.000 populasi warga Palestina pada saat itu. Konflik ini hanya berlangsung hingga tahun 1949, diakhiri dengan kemenangan Israel dengan gencatan senjata dan membuat wilayah Israel semakin bertambah yang meliputi wilayah Yerusalem Barat yang sebelumnya merupakan wilayah Internasional. Sedangkan Yordania menganeksasi wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan Mesir memegang kendali terhadap wilayah Gaza (bbc.com, 2017, diakses pada 18/07/2017).

Namun, tensi antara negara-negara Arab dengan Israel kembali meningkat (khususnya dengan Mesir) setelah Presiden Mesir pada saat itu, Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan Suez pada tahun 1956. Terusan Suez merupakan

jalur laut yang sangat vital, karena merupakan jalur laut yang menghubungkan antara Eropa dan Asia yang sebagian besar dimiliki oleh Perancis dan menjadi perhatian besar Inggris. Perancis dan Inggris meresponnya dengan membuat kesepakatan dengan Israel agar ia menginvasi terusan Suez. Pada bulan Oktober Israel menginvasi Mesir, dimulai dari Gaza, bukit Sinai, kemudian yang terakhir adalah terusan Suez. Mesir kalah dalam konflik bersenjata melawan Inggris, Perancis dan Israel, namun di sisi lain Mesir menang secara politik. PBB mengecam penyerangan tersebut dan mengembalikan terusan Suez kepada Mesir (aljazeera.com, 2008, diakses pada 19/07/2017). Konflik ini juga biasa dikenal sebagai konflik Arab-Israel yang kedua.

Pada tahun 1967, terjadi konflik yang kita kenal sebagai perang "enam hari" atau perang Arab-Israel yang ketiga. Perang ini dimulai dengan meningkatnya serangan terhadap Israel yang dilakukan oleh kelompok gerilya Palestina yang berbasis di wilayah Suriah, Lebanon, dan Yordania. Kemudian melihat situasi ini Israel tidak tinggal diam begitu saja, hal ini tentu saja membuat Israel melakukan serangan balik. Pada bulan November 1966 Israel menyerang perkampungan Al Samu di Tepi Barat bagian Yordania, hal ini membuat 18 orang meninggal dan 54 orang luka-luka. Kemudian pada bulan April 1967 terlibat perang udara dengan Suriah, angkatan udara Israel berhasil menjatuhkan enam jet MiG Fighter milik Suriah. Pada 14 Mei 1967, Presiden Gamal Abdel Nasser berusaha membantu Yordania dan Suriah dengan memobilisasi tentara Mesir ke bukit Sinai. Kemudian pada tanggal 22 Mei Mesir menutup teluk Aqaba, hal ini sangat efektif dilakukan untuk memblokir kota Elat yang merupakan kota

Pelabuhan milik Israel di Selatan Israel dan membuat suplai Israel melalui jalur laut tertutup. Pada tanggal 30 Mei, Raja Hussein dari Yordania datang ke Kairo untuk menandatangani pakta pertahanan dengan Mesir dan menempatkan pasukan Yordania dibawah komando Mesir. Tak lama kemudian, Irak segera bergabung dengan aliansi ini (Etheredge, Lotha, & Tesch, 2015).

Melihat dirinya semakin terancam oleh negara-negara Arab, pada tanggal 5 Juni Israel melakukan serangan *preemptive* secara tiba-tiba. Serangan ini menghancurkan lebih dari 90% angkatan udara Mesir di Tarmac. Serangan yang sama juga dilakukan oleh Israel terhadap angkatan udara Suriah (Etheredge, Lotha, & Tesch, 2015). Tanpa adanya perlindungan dari udara, tentara Mesir sangat rentan dan mudah sekali untuk diserang. Hanya dengan waktu tiga hari pasukan Israel mendapatkan kemenangan di darat, kemudian mengambil alih jalur Gaza dan bukit Sinai hingga tepi timur dari terusan Suez. Sementara itu di bagian Timur Israel, Yordania mulai menembaki Yerusalem Barat yang merupakan dibawah kekuasaan Israel pada tanggal 5 Juni. Hal ini dibalas dengan sangat cepat dan terus-menerus oleh tentara Israel. Pada tanggal 7 Juni, Israel memukul mundur pasukan Yordania dari Yerusalem Timur dan sebagian besar Tepi Barat.

Melihat hal ini Dewan Keamanan PBB tidak tinggal diam. Dewan Keamanan PBB mengusulkan gencatan senjata di hari yang sama dan hal ini diterima oleh Israel dan Yordania, kemudian Mesir di keesokan harinya. Namun, Suriah menolak adanya gencatan senjata. Pada tanggal 9 Juni Israel menyerang dataran tinggi Golan dan mengambil alih wilayah tersebut dari Suriah setelah pertempuran yang berat. Pada akhirnya Suriah menyepakati gencatan senjata pada

tanggal 10 Juni. Pada tanggal 11 Juni, PBB menjadi penengah dalam gencatan senjata tersebut dan sekaligus mengakhiri perang tersebut. Perang dimenangi oleh Israel dan membuat wilayah Israel semakin bertambah empat kali lipat dari yang sebelumnya (history.com, 2017, diakses pada 19/07/2017). Perang ini merupakan prestasi besar bagi Israel, perang ini juga disebut sebagai “Naksa” yang berarti kemunduran atau kekalahan oleh negara-negara Arab dan Palestina (Tahhan, 2017).

Gambar 2.1 Wilayah Palestina dan Israel dari Tahun ke Tahun



Sumber: (countercurrents.org, 2016, diakses pada 19/07/2017)

Pada tanggal 6 Oktober tahun 1973, Suriah dan Mesir menyerang Israel bertepatan dengan hari Yom Kippur (hari raya/suci bagi umat Yahudi), oleh karena itu perang ini sering disebut-sebut sebagai perang Yom Kippur. Mesir dan Suriah melihat hari itu sebagai hari yang sangat tepat untuk melancarkan serangan

tiba-tiba terhadap Israel. Serangan ini dimaksudkan untuk merebut kembali wilayah mereka yang telah direbut oleh Israel akibat kekalahan mereka pada perang Arab-Israel yang ketiga atau perang enam hari. Pasukan Mesir masuk dan menyerang mealui bukit Sinai, sedangkan Suriah bertarung dan berusaha mengusir pasukan tentara Israel di dataran tinggi Golan. Tidak lama setelah Mesir dan Suriah menyerang, Irak segera bergabung dan Yordania segera membantu Suriah. Pasukan Arab pada saat itu terlihat lebih kuat dibandingkan pada pertempuran yang sebelumnya. Setelah beberapa hari, akhirnya Israel bisa membalikkan keadaan dengan dibantu oleh Amerika Serikat dengan mengirimkan persenjataannya. Pada tanggal 25 Oktober, Mesir dan Israel menandatangani kesepakatan gencatan senjata yang dibantu oleh PBB (history.com, 2009, diakses pada 25/07/2017). Perang ini dimenangkan oleh Israel meskipun menelan banyak korban dan menyayangkan pemerintahnya yang kurang tanggap dalam perang ini. Hal ini menyebabkan Perdana Menteri pada saat itu, Golda Meir, turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada bulan April 1974.

Perang ini sebenarnya juga merupakan sebuah *proxy war* antara Rusia dan Amerika Serikat. Dimana Rusia menyuplai persenjataan kepada negara-negara Arab, sedangkan Amerika menyuplai persenjataan kepada Israel. Pada tahun 1970an merupakan tahun dimana tren Perang Dingin sedang berada di puncaknya, sehingga perang ini menjadi penting untuk mendapatkan dukungan di Timur Tengah dan minyaknya bagi Rusia dan Amerika.

Pada tahun-tahun ini juga negara-negara Arab berusaha “menghukum” negara-negara Barat dengan menghentikan ekspor minyaknya kepada negara-

negara Barat, hal ini dinamakan “*the oil weapon*” (Connolly, 2013). Mungkin negara Arab tidak pernah dapat mengalahkan Israel dan sekutunya pada saat perang, namun mereka dapat mengalahkan Barat dengan minyak. Hal ini menyebabkan dampak yang sangat signifikan bagi negara-negara barat dan perekonomian global.

Namun dengan tidak disangka-sangka, Mesir secara diplomatik berusaha merubah keberpihakkannya dari Uni Soviet menjadi sekutu Amerika. Hal ini membuat Mesir dan Israel berdamai pada tahun 1979, setelah kurang lebih 30 tahun berkonflik. Perjanjian ini dinamakan perjanjian *Camp David*. Dengan menandatangani perjanjian damai dengan Israel, akhirnya pada tahun 1982 Israel mengembalikan bukit Sinai kepada Mesir dan Israel mendapatkan pengakuan sebagai negara oleh Mesir. Perjanjian damai yang tidak disangka-sangka ini membuat pasukan Suriah kalah dari pertarungan dan membuat sebagian besar wilayah dataran tinggi Golan dikuasai oleh Israel. Pada tahun 1979, Suriah dan negara Arab lainnya mengeluarkan Mesir dari Liga Arab.

Setelah Mesir dan Suriah sudah tidak berurusan lagi dengan Israel, fokus Israel berubah kepada pasukan gerilya Palestina. Sebagian besar dari mereka berada di Lebanon setelah raja Hussein dari Yordania mengusir mereka dari Yordania dan mulai menyerang Israel dari Lebanon. Pemimpin Palestina dan sekaligus pemimpin PLO (*Palestine Liberation Organisation*) pada saat itu adalah Yasser Arafat. Pada tahun 1982, Israel meluncurkan operasi “*Peace for Galilee*” yang merupakan sebuah invasi militer terhadap Lebanon dengan tujuan menghentikan pergerakan pasukan gerilya Palestina yang dipimpin oleh Arafat

yang bergabung dengan pasukan Lebanon pada saat perang saudara di Lebanon pada tahun 1975 (bbc.com, 2008, diakses pada 25/07/2017). Namun operasi ini berjalan tidak mulus, invasi yang dilakukan oleh Israel menuai kecaman dari dunia internasional, termasuk PBB. Pasukan gerilya Palestina akhirnya terpaksa melarikan diri dari Lebanon ke Tunisia. Namun kepergian pasukan gerilya Palestina dari Lebanon memunculkan masalah baru bagi Israel, yaitu munculnya pasukan gerilya baru dari Lebanon yang sekarang disebut Hizbullah dengan dibantu oleh Iran. Akhirnya setelah tiga tahun berperang di Lebanon, pasukan Israel akhirnya mundur (washingtonpost.com, 2006, diakses pada 25/07/2017).

Pada tahun 1987, terjadilah yang disebut-sebut sebagai Intifada yang pertama. Intifada merupakan sebuah unjuk rasa besar-besaran atau revolusi yang dilakukan oleh warga Palestina kepada Israel dikarenakan Israel telah mengokupasi wilayah Tepi Barat dan jalur Gaza. Keterbatasan persenjataan membuat mereka melawan dengan cara mereka sendiri, banyak dari pemudanya mengenakan masker dan menghujani tentara dan tank milik Israel dengan batu di dekat kamp dan rumah-rumah mereka. Intifada ini merupakan sebuah aksi kebangkitan dari warga Palestina yang selama ini pasif.

Tentara Israel membalas dengan kasar terhadap warga-warga Palestina, mendiskriminasi mereka dengan melakukan jam malam bagi warga Palestina dan sering kali menahan mereka tanpa dibawa ke pengadilan terlebih dahulu dan tuduhan yang jelas (newstrust.org, 2014, diakses pada 25/07/2017). Intifada merupakan sebuah taktik yang mutakhir, dengan kamp pengungsian sebagai pusat

dari aksi mereka. Tujuan utama dari Intifada ini adalah memenangkan simpati dari pemerintah dan masyarakat Arab dan negara-negara Muslim.

Gambar 2.2 Warga Palestina Melempari Batu Kepada Tentara Israel



Sumber: (bbc.co.uk, 2000, diakses pada 25/07/2017)

Pada tahun 1993 Israel dan PLO mencapai sebuah kesepakatan, Perdana Menteri Rabin dan Pimpin PLO Yasser Arafat menandatangani deklarasi Oslo yang menyangkut pengakuan dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan Palestina untuk mengimplementasikan secara bertahap pemerintahan yang mandiri di wilayah Tepi Barat dan jalur Gaza setelah melakukan perjanjian damai. Pada tahun 1994, Palestina diberikan otonomi terbatas di wilayah yang dikuasai oleh Palestina. Wilayah Palestina dibagi menjadi tiga zona; wilayah A dibawah kekuasaan penuh Palestina; wilayah B dibawah pemerintahan sipil Palestina dan di bawah kontrol keamanan Israel; wilayah C di bawah kontrol penuh Israel (aljazeera.com, 2003, diakses pada 25/07/2017). Semenjak itu, tensi antar keduanya mulai mereda dan begitu juga dengan unjuk rasa yang biasanya terjadi

ikut mereda, hal ini tentu saja membawa harapan baru yang lebih baik bagi keduanya.

Pada tahun 2000, terjadi Intifada yang kedua atau "*al Aqsa Intifada*". Hal ini disulut oleh kunjungan politisi oposisi yang kemudian menjadi Perdana Menteri Israel Ariel Sharon ke halaman masjid Al-Aqsa di Yerusalem dengan dijaga ketat oleh polisi dan tentara. Beberapa jam setelah kunjungannya, muncul aksi protes yang segera meluas ke wilayah Palestina lainnya (dw.com, 2010, diakses pada 25/07/2017). Kemudian konflik pun terjadi antara warga Palestina yang menjaga al Aqsa dan petugas keamanan yang menjaga Sharon. Tujuh orang meninggal dalam konflik ini termasuk anak-anak dan dimulainya Intifada yang kedua. Hamas pada 6 Oktober tahun 2000 menyatakan hari itu sebagai "hari kemarahan", mendorong warga Palestina untuk menyerang pos penjagaan Israel di wilayah yang dikuasai Palestina. Tentara Israel yang menjaga situs bersejarah Yahudi, makam Joseph di wilayah yang dikuasai Palestina (Nablus) kabur. Kemudian warga Palestina membakar sebagian makam ini. Hal ini memicu protes oleh warga Israel dan memblokade jalan di wilayah Yahudi dan melarang warga Palestina untuk melintas. Keesokan harinya pada 8 Oktober, terjadi pembakaran masjid di wilayah utara Israel, tepatnya di kota Tiberias (aljazeera.com, 2003, diakses pada 26/07/2017).

Kemudian hal ini berkembang dengan maraknya bom-bom bunuh diri terhadap Israel yang dilakukan oleh kelompok militan Palestina, seperti Hamas di wilayah Tepi Barat. Hal ini membuat Israel memperketat penjagaannya di sekitar wilayah Palestina, melarang ribuan warga Palestina untuk pergi dan berdagang di

wilayah Israel. Pada tahun 2001, Ariel Sharon meluncurkan pesawat tempur F-16 dengan menargetkan Palestina di Gaza untuk pertama kalinya (bbc.co.uk, 2004, diakses pada 26/07/2017). Kemudian serangan-serangan militer oleh Israel terhadap Palestina juga terus dilakukan, seiring dengan maraknya bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok militan Palestina dan konflik pun terus terjadi.

Dalam perkembangannya, belum ada kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan perdamaian pada konflik ini. Setidaknya sudah ada lima ratus lebih resolusi yang dikeluarkan oleh PBB sejak tahun 1947, namun tetap saja tidak membawa dampak yang signifikan dalam mewujudkan perdamaian di konflik ini.

Terjadi kenaikan yang signifikan atas pembunuhan dan korban luka-luka terkait dengan kerenggangan hubungan Israel dan Palestina pada bulan Oktober tahun 2015. Secara keseluruhan, Palestina tercatat telah membunuh warga Israel setidaknya sebanyak 17 orang dan 3 orang tentara Israel, dan telah melukai 87 orang warga Israel dan 80 orang pihak berwajib di Tepi Barat dan Israel pada 27 November 2015. Pihak keamanan Israel juga telah membunuh setidaknya 120 orang dan melukai setidaknya 11.953 orang warga Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Israel secara bersamaan, termasuk pengamat, pengunjung rasa, dan tersangka penyerangan (Human Right Watch, 2016).

Pada Oktober tahun 2015 juga telah terjadi kerusuhan atau kekacauan yang disebabkan oleh penusukan dua orang Israel oleh Palestina hingga mati di Kota tua yang kemudian diikuti dengan penusukan-penusukan dan penyerangan lainnya oleh warga Palestina terhadap Israel (cnn.com, 2015, diakses pada 05/05/2017). Penusukan ini merupakan satu-satunya perlawanan yang dapat dilakukan

Palestina terhadap Israel dikarenakan persenjataan dan keamanan Israel yang sangat canggih dengan dilengkapi penangkal rudal yang siap siaga menghalau segala serangan rudal Hamas atau Palestina dan juga percobaan-percobaan pengeboman. Dampak dari penusukan ini juga sama dengan percobaan pengeboman dan penyerangan rudal, yaitu membuat panik dan ketidak tenangan warga Israel dan Pemerintahnya, Sehingga hal ini marak dilakukan pada tahun 2015 lalu.

Tahun 2014 merupakan tahun terburuk terkait dengan permusuhan antara Israel dan Palestina, khususnya pada bulan Juli hingga Agustus. Tercatat bahwa Israel telah membunuh lebih banyak penduduk sipil Palestina dari tahun sebelum-sebelumnya, sejak pendudukannya pada tahun 1967. Aktivitas Israel di jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur berakibat pada meninggalnya 2.314 warga Palestina dan 17.125 orang luka-luka. Hal ini sangat jauh sekali jika dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 39 orang meninggal dan 3.964 orang luka-luka (UNOCHA annual report, 2015, diakses pada 08/05/2017). Sekitar 500.000 orang Palestina mengungsi akibat konflik yang semakin memuncak, sedangkan sekitar 100.000 orang memilih untuk tetap tinggal (theguardian.com, 2015, diakses pada 08/05/2017).

Penyebab dari eskalasi konflik ini tidak begitu berbeda dengan konflik-konflik yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu adanya tindakan pembunuhan, penculikan atau melukai yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang pada akhirnya pihak yang telah dibunuh, diculik atau dilukai akan membalas

dengan hal serupa dan akan terjadi berulang-ulang hingga akhirnya terjadilah eskalasi konflik antar kedua belah pihak.

Yang terjadi pada 2014 ini awalnya bermula pada hilangnya tiga pelajar Israel di daerah Tepi Barat, kemudian Israel bereaksi dengan pencarian besar-besaran di daerah Palestina dan akhirnya menuduh Hamas. Hal ini ternyata benar dilakukan oleh anggota Hamas tetapi tidak dalam kehendak Hamas itu sendiri. Dengan kata lain anggota Hamas tersebut bertindak sendirinya atau tidak dibawah perintah Hamas. Pada akhirnya ketiga pelajar tersebut ditemukan tewas pada tanggal 30 Juni.

Kemudian pada tanggal 2 Juli, remaja Palestina yang bernama Mohammed Abu Khdeir ditemukan tewas di dekat pemukiman Yerusalem. Berdasarkan informasi kepolisian Israel, hal ini merupakan balas dendam yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Yahudi. Pada tanggal 5 Juli, sepupu Khdeir, Tariq Abu Khdeir dipukuli saat ditangkap oleh kepolisian Israel pada saat demonstrasi di Yerusalem Timur. Hal ini memancing kemarahan warga Palestina atas hal yang dialami keluarga Khdeir. Kemudian terjadilah kerusuhan di Yerusalem, Tepi Barat, dan beberapa pemukiman Arab-Israel. Pada malam harinya, roket diluncurkan dari Gaza ke wilayah Israel dan dibalas oleh Israel dengan beberapa serangan udara ke wilayah Gaza (abcnews.go.com, 2014, diakses pada 08/05/2017). Hanya sedikit roket dan serangan udara yang di tembakan oleh Israel, namun Hamas meluncurkan 40 roket sekaligus dalam sehari pada tanggal 8 Juli dan Hamas sendiri juga mengakui hal tersebut. Kemudian Israel meluncurkan serangan ke Gaza, sebagai bagian dari Netanyahu katakan untuk membuat Hamas membayar

“harga yang mahal” atas tindakannya. Hal ini lah yang pada akhirnya memulai konflik pada Juli 2014 silam (Beauchamp, 2017). Hal ini dinamakan oleh Israel sebagai “*Operation Protective Edge*” sebagai suatu bentuk respon terhadap Hamas yang meluncurkan roket ke Israel.

Pada tahun 2013, terjadi inisiasi perundingan damai oleh Israel dan Palestina, perundingan ini ditengahi oleh Amerika Serikat. Meskipun banyak yang mempercayai bahwa kesepakatan akan sulit di capai, namun tidak menutup kemungkinan untuk mencapai kesepakatan dalam beberapa persoalan. Perundingan damai ini dimulai setelah Israel setuju untuk melepaskan kurang lebih seratus ribu tahanan Palestina yang di penjara di Israel. Sebagian besar dari mereka telah berada di penjara selama kurang lebih dua dekade, dengan tuduhan atas penyerangan terhadap Israel sebelum adanya perundingan Israel Palestina tahun 1993. Mereka akan dibebaskan secara bertahap selama beberapa bulan, tergantung pada proses kesepakatan nantinya.

Perundingan ini membicarakan beberapa kesepakatan antara kedua negara yang diantaranya; bagaimana batas-batas negara Palestina nantinya, bagaimana pembagian atas kota Yerusalem, bagaimana dengan nasib jutaan masyarakat Palestina yang mengungsi dari tanah Palestina saat pembentukan Israel, dan bagaimana jika mereka ingin kembali lagi. Semua terobosan yang dibuat akan tergantung terhadap kepercayaan antar kedua belah pihak (nbcnews.com, 2013, diakses pada 16/05/2017).

**Gambar 2.3 Inisiasi Perundingan Damai Israel-Palestina Tahun 2013 yang
Ditengahi oleh Amerika di Washington**



Sumber: (NBCnews.com, 2013, diakses pada 16/05/2017)

Perundingan ini sebenarnya sudah dimulai secara bertahap dari tahun 2005. Pada saat itu pertemuan di adakan di Sharm el-Sheikh pada 8 Februari tahun 2005, dengan dihadiri oleh mantan Perdana Menteri Ariel Sharon, ketua otoritas Palestina Mahmoud Abbas, mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, dan Raja Abdullah dari Yordania. Dengan menghasilkan keputusan bahwa Palestina harus menghentikan semua tindak kekerasan terhadap Israel, dan Israel harus menarik seluruh aktivitas militernya di Palestina. Israel akhirnya melepaskan Gaza selama kurang lebih 38 tahun dikuasai oleh Israel. Sharon juga menegaskan bahwa hal ini harus dilanjutkan dengan mengadakan negosiasi secara diplomatik. Namun setelah pemilihan umum otoritas Palestina tahun 2006 yang menjadikan Hamas sebagai pemegang pemerintahan Palestina, Israel mengadopsi strategi ganda terhadap Palestina, yaitu dengan tetap menekan Hamas dan kelompok ekstrimis, sementara tetap berusaha membuka dialog dengan Palestina untuk mencapai

solusi yang menguntungkan bagi kedua negara terkait dengan konflik Israel-Palestina. Hingga pada tahun-tahun setelahnya, kedua negara terus memunculkan etikat baik untuk berdamai dengan menggelar beberapa pertemuan yang sebagian juga dibantu oleh Amerika dan hingga pada akhirnya pada tahun 2013 kedua negara bertemu secara langsung dengan ditengahi oleh Amerika (Israel Ministry of Foreign Affairs, 2013). Namun, semua proses negosiasi ini terkesan sia-sia dengan munculnya kembali konflik pada tahun 2014 yang bahkan merupakan salah satu konflik terparah.

Sebagian besar masyarakat dari kedua negara sebenarnya sudah mempunyai kesadaran untuk menghentikan konflik dan secara konsisten mendukung solusi bagi kedua negara (*two-state solution*). Namun, mereka tidak yakin bahwa negosiasi merupakan solusinya, hal ini dikarenakan masing-masing pihak masih saling tidak percaya terhadap satu sama lain. Mereka tidak mempercayai bahwa negosiasi tersebut dapat mencapai keinginan kedua belah pihak (Kelman, 2007).

2.2 Dukungan dan Penolakan Terhadap Kemerdekaan Israel

Dalam pembentukan Israel terdapat dua kubu yang saling berseteru satu sama lain. Di satu sisi adalah kubu negara-negara yang mendukung pembentukan atau kemerdekaan Israel, di sisi lain adalah kubu yang menolak adanya pembentukan atau kemerdekaan Israel. Usaha pembentukan Israel sebenarnya sudah tercium sejak adanya deklarasi Balfour pada tahun 1917, hingga mandat Inggris dan resolusi PBB nomor 181 tahun 1948. Deklarasi Balfour secara tidak langsung menandakan Inggris mengizinkan dan membantu Israel untuk mendirikan negara yang merdeka di tanah Palestina, hingga pada akhirnya Israel

merdeka pada tahun 1948. Resolusi PBB nomor 181 juga secara tidak langsung berusaha membantu Israel untuk membentuk negara Yahudi yang telah lama didambakan oleh orang-orang Yahudi. Resolusi PBB nomor 181 sendiri berisi mengenai pembagian wilayah Palestina menjadi wilayah Yahudi dan wilayah Arab.

Tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan Israel, muncul pengakuan yang secara tidak langsung mendukung kemerdekaan Israel oleh negara-negara lain. Namun, sebagian besar dari pengakuan tersebut masih merupakan pengakuan secara *de facto*. Negara yang pertama kali mengakui negara Israel adalah Amerika Serikat. hanya berselang beberapa menit setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, Presiden Harry Truman segera mengakui Israel secara *de facto*. Baru setahun setelahnya Amerika mengakui Israel secara *de jure*. Uni Soviet merupakan negara kedua yang mengakui Israel dengan berselang tiga hari setelah Israel menyatakan kemerdekaannya, Uni Soviet langsung mengakui Israel secara *de jure*. Hampir setahun setelah pembentukan Israel, pada 11 Mei 1949 Israel menjadi anggota ke 59 PBB (jewishvirtuallibrary.org, 2017, diakses pada 27/07/2017).

Semenjak itu, pengakuan terhadap Israel semakin banyak berdatangan dari negara lain. Setidaknya ada 148 negara yang mengakui Israel sejak tahun 1948 hingga sekarang ini, namun pada tahun 1949 merupakan titik dimana Israel banyak di akui oleh negara-negara lain setelah resmi menjadi anggota PBB. Namun dari 148 negara tersebut, ada tujuh negara yang menarik pengakuannya

terhadap Israel. Negara-negara tersebut adalah Iran, Chad, Kuba, Maroko, Tunisia, Oman dan Qatar.

Pembentukan Israel juga menuai penolakan dari beberapa negara. Meskipun begitu, ada juga negara yang tidak diketahui mendukung atau menolak Israel. Negara-negara ini adalah Lesotho, Ghana, Gambia, Papua Nugini, Rwanda, Madagaskar, Sierra Leone, Uganda, Togo, Tanzania, Zambia, Equatorial Guinea, Botswana, Bhutan, Rep. Afrika Tengah, Burundi (jewishvirtuallibrary.org, 2017, diakses pada 28/07/2017). Negara yang pertama kali menolak pembentukan Israel adalah negara-negara tetangganya, hal ini terbukti dengan adanya serangan oleh kelima negara Arab yang telah disebutkan di atas sesaat setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Dari 101 negara, negara-negara yang menolak adanya Israel pada umumnya berada di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (Newman, 2014). Kemudian sebagian besar negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim yang berada di Asia dan Afrika. Hingga saat ini setidaknya ada 25 negara yang tidak pernah sama sekali mengakui Israel, termasuk Indonesia. Daftar ke 25 negara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Daftar Negara yang Tidak Pernah Mengakui Israel

Afghanistan	Guinea	Mali
Aljazair	Indonesia	Niger
Arab Saudi	Irak	Pakistan
Bahrian	Kuwait	Somalia
Bangladesh	Korea Utara	Sudan
Brunei Darussalam	Lebanon	Suriah

Comoros	Libya	Uni Emirat Arab
Djibouti	Malaysia	Yaman
	Maladewa	

Sumber: (jewishvirtuallibrary.org, 2017, diakses pada 28/07/2017)

2.3 Perpolitikan Dalam Negeri Irlandia

Sistem pemerintahan Irlandia menganut sistem demokrasi parlementer. Kepala pemerintahan disebut Taoiseach (Perdana Menteri), sedangkan kepala negara adalah Presiden. Namun Taoiseach juga memiliki fungsi seperti penasihat Presiden dan penghubung terhadap beberapa institusi dengan Presiden (Kenny, 2013). Kemudian wakil Perdana Menteri disebut Tánaiste. Taoiseach dan Kementerian memegang fungsi Eksekutif. Parlemen disebut sebagai Oireachtas. Presiden dipilih melalui pemilu oleh rakyat Irlandia selama 7 tahun sekali dan hanya boleh memegang kekuasaan maksimal selama dua periode. Kemudian ada juga 114 pemerintahan lokal di Irlandia yang menjalankan fungsi rumah tangga, transportasi, penyediaan air, pengendalian limbah, edukasi, kesehatan dan kesejahteraan (eu2013.ie, 2013, diakses pada 17/06/2017).

2.3.1 Parlemen

Oireachtas atau Parlemen dibagi menjadi dua bagian: Dáil Éireann (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Seanad Éireann (Senat). Dáil memiliki 166 anggota yang disebut sebagai Teachtaí Dála (TD), yang dipilih melalui representasi proporsional dengan pemungutan suara yang dapat di pindah tangankan dan pemilihan diselenggarakan lima

tahun sekali. Seanad memiliki 60 anggota dan 11 diantaranya diangkat oleh Taoiseach. Kemudian sisanya dipilih melalui panel di universitas-universitas nasional. Seanad bisa menginisiasi dan merevisi perundang-undangan, tetapi Dáil dapat menolak amandemen dan mengajukan undang-undang (Houses of the Oireachtas, 2017). Namun, yang paling berpengaruh dalam menentukan kebijakan Irlandia adalah Dáil dibanding Seanad.

Menempati kursi Dáil sangatlah penting untuk ikut serta dalam pemerintahan Irlandia. Dáil merupakan salah satu institusi yang dapat merumuskan kebijakan di Irlandia selain Presiden. Anggota Dáil sendiri dipilih melalui suara terbanyak partai, semakin banyak suara yang di dapat partai tersebut maka semakin banyak pula kursi yang dapat partai tersebut tempati. Namun, Dáil sendiri lebih sering di dominasi oleh tiga partai besar yang tadi telah di sebutkan yaitu Fianna Fail, Fine Gael, dan Sinn Fen. Partai buruh sendiri baru ikut mendominasi di dalam Dáil baru-baru ini saja.

2.3.2 **Partai**

Dalam pemerintahan Irlandia, yang lebih berpengaruh dalam membuat kebijakan adalah Presiden dan Dáil. Dáil sendiri berisikan orang dari partai yang ada di Irlandia. Namun hanya ada 4 partai besar yang biasanya selalu mendominasi di Irlandia, yaitu Fine Gael, Fianna Fail, Sinn Fein, dan partai buruh. Partai yang pertama kali muncul adalah partai Sinn Fein pada tahun 1905 yang dibentuk oleh Arthur

Griffith pada saat Irlandia ingin memisahkan diri dari Inggris. Sebenarnya partai Fianna Fail dan Fine Gael juga masih mempunyai hubungan dengan Sinn Fein, dimana pada tahun 1922 terjadi perpecahan terkait dengan tawaran Inggris yang menawarkan otonomi, bukan merdeka secara keseluruhan. Para pemimpin Sinn Fein yang menerima tawaran ini menjadi Fine Gael, sedangkan yang menolaknya menjadi Fianna Fail. Kemudian karena Irlandia Utara masih menjadi bagian dari Inggris, terlahirlah gerakan militan baru beberapa dekade kemudian, yang mereka klaim sebagai Sinn Fein generasi kedua dengan ideologi yang sama dan juga nama yang sama.

Fianna Fail yang dalam bahasa Inggris berarti "*The Warriors of Destiny*" dibentuk pada tahun 1926 oleh Eamon de Valera, ia merupakan pemimpin dalam pemberontakan melawan Inggris. Ia juga merupakan Presiden Sinn Fein pada saat perang melawan Inggris dan juga berseberangan dengan Michael Collins (sosok panutan Fine Gael) terkait perjanjian dengan Inggris. Hal ini menarik Irlandia dalam perang saudara pada 28 Juni 1922 sampai 24 Mei 1923. de Valera mengajak sebagian besar aktivis Sinn Fein untuk bergabung dengan partai barunya dan parlemen (Fianna Fail), sehingga menjadikan dirinya sebagai tokoh politik yang paling dominan di Irlandia selama abad ke-20 (Fiannafail.ie, 2017, diakses pada 18/06/2017).

Fianna Fail menjadi partai yang paling dominan di dalam Dáil sejak tahun 1932 hingga tahun 2011. Fianna Fail sendiri beraliran

sebagai partai republik, republik disini berarti sebagai partai yang menginginkan adanya persatuan dalam pulau Irlandia sendiri (menginginkan Irlandia Utara untuk bersatu dengan Republik Irlandia) dan menjalankan komitmen filosofi republik yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan (Fiannafail.ie, 2017, diakses pada 18/06/2017). Fianna Fail sendiri dalam politik Irlandia selalu menjadi kelompok oposisi terhadap Fine Gael, dan arah politiknya agak condong ke kanan.

Fine Gael atau yang dalam bahasa Inggris "*The Tribe of the Irish*" terbentuk pada tahun 1933, mereka mempunyai tokoh panutan yaitu Michael Collins. Ia juga ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan Irlandia, merupakan pendana Sinn Fein, memimpin operasi intelejen IRA dan pasukan di Dublin pada saat perang kemerdekaan Irlandia pada tahun 1919-1921. Ia bersama dengan Arthur Griffith (salah satu pendiri Sinn Fein) menyetujui negosiasi perjanjian dengan Inggris yang membuat perang dengan Inggris berakhir dan terbentuknya negara Irlandia yang bebas dari campur tangan Inggris. Namun, beberapa tahun kemudian ia dibunuh oleh mantan rekannya sendiri. Diduga hal ini dikarenakan ia mendukung perjanjian dengan Inggris (Finegael.ie, 2017, diakses pada 18/06/2017).

Fine Gael terbentuk atas penggabungan dari beberapa kelompok, yaitu kelompok yang pro terhadap perjanjian dengan Inggris yaitu Cumann na nGaedheal yang dipimpin oleh W.T. Cosgrave, partai

tengah (*Centre Party*) dibawah Frank MacDermot, dan penjaga nasional (*National Guard*). Fine Gael juga memilik nama lain yaitu partai persatuan Irlandia atau dalam bahasa inggris ‘*the United Ireland Party*’ (Finegael.ie, 2017, diakses pada 18/06/2017). Fine Gael mendominasi pemerintahan hanya pada saat berkoalisi dengan partai buruh saja, dan Fine Gael yang memegang pemerintahan Irlandia sekarang ini. Arah politik mereka agak condong ke kanan dengan ideologi mereka yaitu Kristen demokrasi dan liberal konservatif.

Sinn Fein yang sekarang merupakan Sinn Fein generasi kedua, seperti yang sudah disebutkan diatas. Terbentuknya Sinn Fein yang sekarang bertujuan untuk membantu IRA dalam menggulingkan pemerintahan Protestan Irlandia Utara dan memaksa wilayah tersebut untuk bergabung dengan wilayah selatan. Sinn Fein yang sekarang dipimpin oleh Gery Adams, ia merubah Sinn Fein menjadi lebih terorganisir dan menjadikan partai tersebut lebih termotivasi selama dua dekade. Pada tahun 1983, saat ia masih menjadi komandan IRA, ia ditunjuk menjadi presiden Sinn Fein dan menjabat hingga sekarang di umurnya yang sudah mencapai 67 tahun (Pogatchnik, 2016).

Di tahun 1986 ia akhirnya membawa Sinn Fein untuk menempati kursi di Parlemen. Sinn Fein sendiri juga ada di Irlandia Utara dan juga merupakan salah satu partai besar disana. Sekarang ini Sinn Fein menduduki peringkat ketiga dalam politik Irlandia (Pogatchnik, 2016). Sinn Fein yang sekarang masih mempunyai

ideologi yang sama dengan yang dulu, yaitu *Republican*, nasionalis sayap kiri, dan sosial demokratik. Arah politik Sinn Fein adalah sayap kiri.

Partai buruh dibentuk pada tahun 1912 oleh James Connolly, James Larkin dan William O'Brien sebagai sayap politik dari kongres perdagangan Irlandia. Partai ini juga ikut berjuang dalam kemerdekaan Irlandia dan *easter rising* pada tahun 1916. Sebenarnya keikutsertaan partai ini dalam kemerdekaan Irlandia dan *easter rising* masih menjadi perdebatan antara pemimpin partai hingga sekarang. James Connolly, salah satu penandatangan proklamasi dan juga pemimpin partai buruh, ikut berpartisipasi dalam *easter rising* bersama dengan tentara, dan berakhir dengan dieksekusi pada bulan Mei 1916. Partai ini menolak perjanjian yang dilakukan Inggris terhadap Irlandia. Partai Buruh jika dibandingkan dengan ketiga partai yang telah disebutkan sebelumnya, berada di tingkat yang paling akhir. Pada pemilu tahun 1992, partai buruh mendapatkan suara tertinggi yang pernah mereka dapatkan (19,3%) dan perwakilan terbesar (33). Hal ini memberikan jalan pada partai buruh untuk masuk kedalam jajaran pemerintahan selama enam kali (Labour.ie, 2017, diakses pada 19/06/2017).

Arah politik mereka lebih condong agak ke kiri, dengan ideologi mereka yaitu sosial demokrasi. Partai buruh saat ini berada di peringkat ketiga dalam menempati kursi Dáil dibawah Fine Gael dan

Fianna Fail. Partai buruh saat ini sedang berkoalisi dengan Fine Gael, namun masih tidak mampu menduduki peringkat kedua di dalam Dáil.

2.3.3 **Presiden**

Presiden dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu warga negara Irlandia dengan umur 35 tahun ke atas dan harus memiliki dukungan tidak kurang dari 20 anggota Dáil atau Seanad Éireann, atau tidak kurang dari 4 daerah administratif. Presiden diganti setiap 7 tahun sekali dan hanya boleh menjabat selama 2 periode berturut-turut dan Presiden harus tinggal di Dublin atau di dekat Dublin. Presiden memegang kendali atas kebijakan domestik maupun luar negeri. Presiden merupakan komandan tertinggi pertahanan militer dan Presiden yang bertugas saat ini adalah Michael D. Higgins. Presiden juga bertugas untuk menunjuk Taoiseach (Perdana Menteri) dengan persetujuan Dáil (President of Ireland, 2017, diakses pada 30/07/2017).

Setidaknya selama tahun 2005-2015 ada 2 orang Presiden yang telah memegang kursi kepemimpinan, salah satunya memimpin selama dua periode. Kedua orang tersebut adalah Mary McAleese yang menjabat dari tahun 1997 hingga 2011, dan Michael D. Higgins yang menjabat dari tahun 2011 hingga sekarang. Mary McAleese telah menjabat selama dua periode secara berturut-turut.

Pada tanggal 11 November 1997, Mary McAleese dilantik sebagai Presiden Irlandia yang ke delapan. Kemudian ia terpilih kembali untuk yang kedua kalinya pada tanggal 1 Oktober 2004 dengan satu-satunya calon yang sah pada saat itu. Ia merupakan Presiden wanita kedua di Irlandia, dan merupakan Presiden Irlandia pertama yang berasal dari Irlandia Utara (President of Ireland, 2017).

Ia lahir di Belfast, Irlandia Utara pada tahun 1951. Keluarganya terpaksa meninggalkan kampung halamannya di Irlandia Utara setelah di usir oleh kelompok *Loyalist* disaat konflik "*The Troubles*" terjadi. Ia merupakan penganut Khatolik Roma yang taat dan Nasionalis, dimana di Irlandia Utara sendiri mayoritas penganut Kristen dan Unionist. Sehingga ia sangat rawan sekali diserang pada saat konflik *The Troubles* terjadi. Pada suatu kesempatan, rumahnya di brondong machine gun saat ia sedang menjalankan ibadah misa dan di kesempatan lain, saudara laki-lakinya yang tuli telah dipukuli. Ia mempelajari ilmu hukum di universitas Queen's di Belfast dan Trinity College di Dublin. Pada tahun 1974 ia dipanggil untuk menjadi advokat di Irlandia Utara dan sekaligus di Republik Irlandia. Pada tahun 1975, di umurnya yang baru menginjak 24 tahun, ia diangkat menjadi profesor hukum kriminal, kriminologi dan penologi di Trinity College. Ia sempat menjadi seorang jurnalis pada tahun 1979 (Sherwood, 2014).

Awal karir politiknya kurang berjalan dengan lancar sebagai kandidat daerah pemilihan parlementer dari partai Fianna Fáil pada

tahun 1987. Namun pada tahun 1997, pada akhirnya ia berhasil menang pada pemilihan Presiden bersama Fianna Fáil, dengan sangat mengejutkan mengungguli Albert Reynolds yang merupakan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 1992 hingga 1994. Pada tahun 2004, pada akhirnya ia terpilih kembali sebagai kandidat tunggal dan independen (Marsh, 2015). Kemenangan ini diduga karena hubungannya dengan Sinn Fein yang merupakan sayap politik dari IRA. Hingga akhirnya pada tahun 2011 jabatannya berakhir dan di gantikan oleh Michael D. Higgins.

Michael Daniel Higgins lahir pada tahun 1941 di kota Limerick dan dibesarkan di provinsi Clare. Pada umur 5 tahun ia sudah terpisah dengan kedua orangtuanya. Ia merupakan seorang buruh dan pegawai bank pada saat sebelum menempuh pendidikan tinggi. Dengan bantuan dana dari seorang darmawan, ia berhasil untuk kuliah. Ia menempuh kuliahnya di Universitas Galway, Universitas Manchester dan Universitas Indiana. Pada saat kuliah di Universitas Galway, ia menjadi ketua dewan pelajar dan mulai bergabung dengan partai Fianna Fáil. Namun di bawah pengaruh politisi Noël Browne, ia merubah arah politiknya ke Sosialisme dan partai Buruh (Wallenfeldt, 2013).

Ia merupakan seorang politisi, penyair dan penulis, dosen, advokat HAM. Hampir semua pelayanan publik pernah ia rasakan, termasuk sebagai Menteri Kesenian dan Kebudayaan, dan Gaeltacht. Keinginannya untuk turun langsung dalam mewujudkan kesetaraan dan

keadilan membuat dirinya terjun ke pelayanan publik dan ia sempat menjadi konselor dan walikota, kemudian selama 9 tahun ia telah menjadi Seanad dan 25 tahun di Dáil Éireann. Ia mempunyai ketertarikan dan solidaritas yang kuat terhadap orang-orang Irlandia yang ada di luar negeri dan ia sering mengunjungi *Irish Centres* di Inggris. Selama hidupnya, Higgins selalu mengkampanyekan HAM dan mempromosikan perdamaian dan demokrasi, baik di Irlandia maupun di negara-negara lainnya seperti Nicaragua, Chili, Irak, dan Somalia. Ia dikenal sangat radikal dalam menanggapi isu-isu HAM di seluruh dunia. Pada tahun 1992, ia menerima hadiah perdamaian Seán Macbride dari biro perdamaian Internasional di Helsinki atas usahanya dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia (President of Ireland, 2017).

Dua kali ia gagal dalam menempati kursi Dáil, sebelum akhirnya di tunjuk sebagai Seanad oleh Taoiseach (Perdana Menteri) Liam Cosgrave pada tahun 1973. Higgins pada akhirnya terpilih untuk mewakili Galway Barat di Dáil (1981-82) dan terpilih kembali dalam Seanad (1983-87). Ia juga sempat menjabat sebagai walikota Galway selama dua periode (1982-83, 1991-92). Pada tahun 1993, dalam koalisi pemerintahan Fianna Fáil – Partai Buruh yang dipimpin oleh Albert Reynolds, Higgins menjadi Menteri Kesenian, Budaya dan Gaeltacht. Ia menjadi ikon nasional pada tahun 2003 saat memimpin partai Buruh. Ia menjadi kandidat partai Buruh dalam pilpres tahun 2004, namun ia

kalah pada saat itu. Pada tahun 2011 akhirnya ia terpilih sebagai Presiden Irlandia ke 9 dengan voting mencapai 40 persen (Wallenfeldt, 2013).

2.4 Sikap keberpihakan Irlandia sebelum dan sesudah kemerdekaan Israel

Irlandia pada dasarnya merupakan negara yang netral dalam beberapa konflik, misalnya dalam perang dunia kedua. Namun tidak dalam konflik Israel-Palestina, dimana Irlandia cenderung menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu pihak. Keberpihakan Irlandia dalam konflik Israel-Palestina juga mengalami sebuah perubahan pada saat sebelum terbentuknya Israel dan sesudah terbentuknya Israel. Dimana pada saat sebelum terbentuknya Israel, Irlandia lebih terlihat berpihak kepada Israel. Sedangkan setelah kemerdekaan Israel, Irlandia cenderung lebih berpihak kepada Palestina.

Pada tahun 1920an dan 1930an, orang-orang Irlandia mempunyai simpati yang besar terhadap pergerakan kaum Zionis. Hal ini disebut-sebut bahwa penderitaan kaum Yahudi sama dengan apa yang mereka rasakan di masa lalu pada saat zaman kolonialisme oleh Inggris (Miller, 2010). Zionis mempunyai filosofi yang menarik bagi orang-orang Irlandia, dimana filosofi tersebut juga sempat ingin di terapkan oleh Irlandia namun gagal. Dimana setiap negara mempunyai keinginan untuk menghidupkan bahasa nasional mereka, dalam hal ini Israel dengan bahasa Ibrani dan Irlandia dengan bahasa Gaelic (Dowd, 2010). Bahasa Gaelic adalah bahasa yang digunakan oleh bangsa Celtic yang merupakan nenek moyang dari orang-orang Irlandia dan Skotlandia. Israel dan Irlandia juga

sebenarnya mempunyai suatu koneksi, dimana salah satu Presiden Israel yaitu Chaim Herzog merupakan keturunan Irlandia dan dilahirkan di Irlandia.

Pada tahun 1880an dan 1890an terjadi gelombang imigrasi Yahudi ke Irlandia, kebanyakan dari mereka juga tinggal di kota-kota besar Irlandia dan sebagian besar dari mereka datang dari Lithuania. Orang-orang Yahudi di Irlandia juga mempunyai peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Irlandia, salah satunya adalah Robert Briscoe.

Keluarga Briscoe sudah ikut dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Irlandia semenjak ayah Robert Briscoe, yaitu Abraham Briscoe pindah ke Irlandia. Kondisi Irlandia dibawah jajahan Inggris membuat Abraham Briscoe bergabung dengan kelompok Nasionalis. Robert Briscoe bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Irlandia, bersama dengan Eamon de Valera yang pada akhirnya membuat hubungan mereka semakin dekat. Eamon de Valera merupakan pemimpin dalam perang kemerdekaan Irlandia tahun 1919 hingga tahun 1921. Dalam perang kemerdekaan, Briscoe bertempur dibawah komando IRA (*Irish Republican Army*). Ia menjadi orang Yahudi Irlandia pertama dalam parlemen (*Dáil*), dan kemudian bergabung dengan partai Fianna Fáil (Mckee, 2014).

Keluarga Briscoe menjadi salah satu orang penting bagi Irlandia dan bahkan bagi Israel. Anak Robert, yaitu Ben, berkontribusi menjadi anggota *Dáil* dan sebagai Walikota Dublin. Kemudian salah satu cucu Abraham Briscoe, yaitu Daniel, mengikuti gelombang Imigrasi ke Israel (*Aliya*) dan menjadi praktisi medis disana (Mckee, 2014). Perjuangan orang-orang Irlandia untuk mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1919 hingga 1921 juga menjadi inspirasi bagi

kelompok Zionis untuk mendapatkan kemerdekaannya terhadap Inggris. Oleh karena kedekatan historis dan sejarah inilah diduga pada saat sebelum kemerdekaan dan awal kemerdekaan Israel, Irlandia lebih terlihat condong terhadap Israel.

Namun, dukungan Irlandia terhadap Israel lebih berupa dukungan moral saja dan adanya beberapa koneksi antara Irlandia dengan Israel seperti yang telah disebutkan di atas. Penulis dalam penelitian ini hanya menemukan satu dukungan secara langsung yang dilakukan oleh Irlandia kepada Israel, yaitu adanya dukungan politik berupa pengakuan secara *de facto* terhadap Israel pada 12 Februari 1949. Dimana pada tahun tersebut Irlandia belum merubah dukungannya secara penuh kepada Israel. Tidak ada bantuan dana atau militer yang ditemukan penulis terhadap Israel oleh Irlandia.

Kemudian sesaat setelah kemerdekaan Israel, Irlandia menunjukkan sikap yang berbeda terhadap Israel. Irlandia kemudian lebih menunjukkan keberpihakkannya kepada Palestina. Beberapa saat setelah merdekanya Israel pada tahun 1948, mulai bermunculan kelompok anti-semitisme di Irlandia walaupun tidak terlihat secara langsung. Bahkan orang-orang dalam pemerintahan Irlandia banyak yang merubah dukungannya yang semula lebih mendukung Israel menjadi lebih mendukung Palestina. Awal mulanya hanya kelompok sayap kiri dan Republican saja, tetapi sekarang kelompok sayap kiri pun juga lebih mendukung Palestina (Dowd, 2010). Dalam parlemen Irlandia (Dáil) sendiri hampir sudah tidak ada pendukung tetap Israel, yang ada hanya pendukung Palestina atau yang tidak peduli atau tidak memiliki perhatian terhadap konflik

Israel-Palestina. Pada saat ini, sudah sangat jarang sekali adanya dukungan dari politisi Irlandia terhadap Israel.

Berbeda dengan Mayoritas negara-negara Eropa lainnya, Irlandia merupakan salah satu negara yang sangat aktif menyuarakan dukungannya terhadap Palestina dalam konflik Israel-Palestina dalam kancah internasional, baik di Uni Eropa maupun di PBB. Irlandia baru mengakui Israel pada tahun 1963 secara *de jure*, 15 tahun setelah Israel merdeka dan baru membangun kedutaannya di Tel Aviv pada tahun 1996 (Miller, 2010). Hal ini menjadikan Irlandia sebagai negara Eropa yang paling terakhir mengakui Israel. Irlandia juga baru mengizinkan Israel untuk membangun kedutaannya di Irlandia pada Desember tahun 1993 dan merupakan negara Eropa terakhir yang mengizinkan Israel membangun kedutaan di negaranya. Kemudian, Irlandia merupakan negara Eropa pertama yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada tahun 1980 dan secara terus-menerus berfokus pada isu-isu pengungsi Palestina pada akhir tahun 1960an, hal ini berkaitan dengan perang enam hari antara Israel dengan negara-negara Arab (Savage, 2013).

Pada tahun 1967, pemerintah Irlandia mendukung resolusi PBB nomor 242 yang menuntut agar Israel untuk segera menarik mundur pasukannya dari seluruh wilayah yang didudukinya dalam perang enam hari. Pada tahun 2004, Menteri Luar Negeri Irlandia yaitu Brian Cowen menyatakan untuk mendukung inisiatif Jenewa dan rencana Liga Arab yang berisi sebuah rencana untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina dengan membuat inisiasi damai, dan juga mengkritik keras pembangunan tembok pembatas untuk membatasi Israel dan Palestina yang

dilakukan oleh Israel (Doyle, 2007). Pada bulan Juni 2010, Irlandia mengirimkan kapal ekspedisi kemanusiaan Rachel Corrie ke Palestina. Hal ini dikarenakan Israel melakukan tindakan blokade terhadap jalur Gaza. Namun, pengiriman kapal tersebut menuai kontroversi, dikarenakan kapal tersebut di cegat oleh pasukan pertahanan Israel dan menyebabkan sedikit ketegangan antara pemerintah Irlandia dengan pemerintah Israel (Hayes, 2010).

Pemerintah Irlandia secara konsisten telah mengirimkan bantuan dana terhadap Palestina dari tahun 2005 hingga tahun 2015. Pada tahun 2014, pemerintah Irlandia menggelontorkan dana sebesar 10 juta euro untuk mengembangkan program edukasi di Palestina (Department of Foreign Affairs and Trade, 2014). Pada tanggal 16 Februari 2015, Menteri Luar Negeri Irlandia, Charlie Flanagan, pada saat kunjungannya ke Palestina menyatakan bahwa pemerintah Irlandia telah memberikan bantuan dana sebesar 4,7 juta euro pada warga Palestina di Jalur Gaza yang menderita akibat serangan Israel tahun lalu, bantuan ini diberikan melalui salah satu badan PBB yaitu UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency*). Charlie Flanagan juga menyatakan bahwa bantuan Irlandia melalui UNRWA telah mencapai 48 juta euro sejak tahun 2005. Irlandia juga merupakan pendukung utama UNRWA yang berfokus pada bantuan terhadap Gaza dengan menggelontorkan dana lebih dari 5,6 juta euro untuk bantuan kemanusiaan pada tahun 2006 (Department of Foreign Affairs and Trade, 2015).

Bantuan Irlandia terhadap Palestina cenderung terus meningkat pada tahun 2005 hingga 2013, namun agak menurun pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan

pengalihan pengeluaran anggaran negara pada tahun 2014 (estimates for public service 2015, 2015). Sedangkan pada tahun 2015 Irlandia memperbarui programnya dengan lebih memfokuskan kepada program edukasi dibandingkan memberikan bantuan dana (Irish Aid, 2015). Pada tahun 2005, 4,49 juta euro telah di berikan untuk membantu rakyat Palestina dan pada tahun 2013, bantuan meningkat menjadi 10,7 juta euro (Department of Foreign Affair and Trade, 2013). Hal ini juga dinyatakan Menteri Luar Negeri Irlandia, Charles Flanagan setelah mengadakan kunjungan singkat ke Jalur Gaza (Khudzaifah, 2015). Menurut laporan Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Irlandia, pihaknya telah memberikan dana kepada Palestina hingga 89,62 juta euro selama 10 tahun terakhir (Department of Foreign Affair and Trade, 2015).